

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Secara umum Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan umum sudah cukup efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah namun masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan Peraturan tersebut.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar hal ini karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah seperti dalam hal pemeliharaan tidak berjalan secara maksimal karena kurangnya kesadaran diri dari pengguna barang sehingga banyak aset yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik dan membutuhkan anggaran yang lebih untuk pemeliharaan aset, Selanjutnya terkait dengan biaya pemeliharaan yang disediakan oleh SKPD tidak sesuai atau kurang dari biaya pemeliharaan yang seharusnya dibutuhkan untuk pemeliharaan dan merawat aset milik daerah, berikutnya aparatur yang dimutasi tidak melakukan pengembalian barang seperti laptop sehingga menyulitkan dalam

proses pembuatan laporan karena fisik dari barang tersebut sudah tidak ada, Terkait dengan inventarisasi di temukan pada daftar kartu inventaris barang masih tercatat barang yang sudah rusak dan hilang yang menghambat dalam proses pembuatan pelaporan.

5.2. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba merekomendasikan beberapa saran terkait dengan Pengelolaan Barang milik Daerah di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdapat di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo harus lebih efektif dan mengikuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara agar tidak terjadi penyimpangan maupun kelalaian dalam penerapan pengelolaan barang milik daerah.
2. Sebaiknya kepala dinas harus tegas dan memberikan sanksi apabila ada aparatur yang tidak melakukan pengembalian Barang Milik Daerah, selanjutnya dalam hal pemeliharaan aset sebaiknya setiap SKPD harus menyesuaikan dengan anggaran yang lebih diperlukan untuk biaya pemeliharaan aset sehingga aset milik negara terpelihara dengan baik, Terkait dengan inventarisasi seharusnya pengelola barang harus rutin melakukan pengecekan dan

pencatatan apabila ada barang yang sudah rusak, hilang, atau dipindahkan di setiap bidang supaya Barang Milik Daerah yang ada di bidang-bidang sesuai dengan yang ada dikartu inventaris barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Irawaty. 2014. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo), *Skripsi*: Universitas Negeri Gorontalo.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Indeks: Jakarta Barat.
- Erizul dan Febri Yuliani, 2014. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah, *Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 2*.
- Hasfi Nyemas, Martoyo, Dwi Haryono 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan Dan Aset Kabupaten Sintang), *Jurnal Pmis-Untan-Psian-2013*.
- Kamarudin, 2014. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset, *Skripsi*: Universitas Negeri Gorontalo.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance Democratization, Local Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value For Money, Participatory Development, Serial Otonomi Daerah*, Yogyakarta.
- Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pangaribuan dan sumini, 2010. "Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah" Jurnal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta, Graha ilmu, 2006.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Undang- undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Widodo, 2014. *Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Jakarta.